INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) KABUPATEN TANGERANG



2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
BAPPEDA-TANGERANG REGENCY

INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) KABUPATEN TANGERANG

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
BAPPEDA-TANGERANG REGENCY

KATA PENGANTAR/*PREFACE*

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan perencanaan, monitoring, maupun evaluasi berbagai program peningkatan kebudayaan memerlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan status dan perkembangan setia dimensi pembangunan kebudayaan. Dimesi dimaksud mencakup tujuh hal yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender.

Publikasi "Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2025" menyajikan data dan analisis yang terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025.

Publikasi ini terealisasi berkat kerja sama banyak pihak terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. Diucapkan penghargaan tinggi serta terima kasih kepada semua pihak atas segala kontribusi yang diberikan. Semoga publikasi ini membawa manfaat bagi semua pihak.

Tigaraksa, April 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang,

Dr. H. Ujang Sudiartono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
197103261999021001

DAFTAR ISI/*CONTENTS*

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Kabupaten Tangerang 2025
Cultural Development Index Tangerang Regency 2025

KATA PENGANTAR/*PREFACE* ii

DAFTAR ISI/*CONTENTS* iii

DAFTAR GAMBAR/*LIST OF FIGURES* v

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES* vi

BAB 1 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan dan Manfaat 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB 2 13

2.1 Kebudayaan 13

2.2 Pemajuan Kebudayaan 13

2.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan 7 Dimensi Pembentukanya 14

2.3.1 Dimensi Ekonomi Budaya 15

2.3.2 Dimensi Pendidikan 15

2.3.3 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya 18

2.3.4 Dimensi Warisan Budaya 21

2.3.5 Dimensi Ekspresi Budaya 24

2.3.6 Dimensi Budaya Literasi 26

2.3.7 Dimensi Gender 27

BAB 3 31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 31
3.2 Jenis Data dan Metode Penelitian 31
3.3 Populasi dan Sampel 35
3.4 Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 37
3.5 Definisi Operasional 51

BAB 4 59
4.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang ... 59
4.2 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 66
4.3 Analisis Perbandingan IPK Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2023 dan 2024 78
4.3.1 Perbandingan dengan IPK Provinsi Banten 78
4.3.2 Perbandingan dengan IPK Indonesia 85

BAB 5 93
5.1 Kesimpulan 93
5.2 Saran 95

DAFTAR PUSTAKA/*REFERENCES* 97

DAFTAR GAMBAR/*LIST OF FIGURES*

Gambar **Halaman**
Figure *Page*

1. Tahapan perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan 37

2. Dimensi penyusun IPK Kabupaten Tangerang, 2025 61

3. Grafik batang perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Provinsi Banten Tahun 2023-2024..... 82

4. Grafik batang perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Indonesia Tahun 2023-2024..... 87

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES*

Tabel **Halaman**
Table *Page*

1. Tahapan penentuan sampel.....33

2. Pembobotan dimensi untuk menghitung nilai IPK.....49

3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK.....51

4. Capaian dimensi dan indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang, 2025.....63

5. Kriteria capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).....78

6. Perbandingan nilai dimensi IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Provinsi Banten Tahun 2023-2024.....79

7. Perbandingan nilai dimensi IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Indonesia Tahun 2023-2024.....85



PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kebudayaan, hal ini ditandai dari semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu *Bhineka Tunggal Ika* berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia dengan keragaman budaya yang tersebar diseluruh wilayah kepulauan menunjukkan bagaimana peradaban suatu bangsa terjalin serta komitmen penduduk dalam menjaga kelestarian budaya yang dimiliki. Adanya suatu budaya pada masyarakat akan menyebabkan munculnya ciri khas pada suatu bangsa yang dapat menjadi jati diri sekaligus penguat modal dasar pembangunan.

Keterkaitan antara kebudayaan dengan pembangunan terjalin dengan erat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata diseluruh wilayah. Kebudayaan suatu bangsa tidak terlepas dari nilai budaya dan sikap mental yang mencakup hal-hal seperti etos kerja, motivasi untuk berprestasi, komitmen, dan daya juang yang menjadi faktor pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa, sehingga kebudayaan menjadi salah satu landasan awal dalam

mencapai kemajuan pembangunan. Kondisi ini sudah dibuktikan oleh sebagian negara di kawasan Asia seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, China, dan Taiwan. Negara-negara tersebut berhasil melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi yang berbasis kebudayaan, melalui penggunaan prinsip kapitalisasi pada nilai-nilai kebudayaan berdasarkan hasil proses modernisasi (Simanjuntak et al., 2023).

Krusialnya peranan yang dimiliki aspek kebudayaan pada pembangunan suatu negara menyebabkan dilakukannnya berbagai upaya oleh pemerintah dalam menunjang peningkatan peran kebudayaan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pada pentingnya upaya dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Kondisi ini menjadikan kebudayaan berperan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Perkembangan budaya secara berkelanjutan, diharapkan berguna dalam memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta bisa membawa arah perkembangan peradaban dunia yang lebih maju. Informasi yang tepat dibutuhkan dalam mendukung tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan. Hal terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan harus dibuat berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi terkait pembangunan kebudayaan juga menjadi pertimbangan pada wilayah Kabupaten Tangerang yang memiliki keanekaragam suku dan corak budaya. Kebudayaan di Kabupaten Tangerang berfungsi dalam menunjang pembangunan pada berbagai bidang, contohnya perkembangan aneka kesenian Wayang Golek, Topeng (Ubrug), Bendrong Lesung, Sintren, Gacle, Kendang Pencak, Patingtung, Wayang Kulit, Cokek, Gambang Kromong, Lenong, Tanjidor, dll. Perkembangan kebudayaan tersebut ada pada setiap aspek kehidupan seperti upacara tradisional, permainan tradisional, kesenian, kuliner tradisional, pengobatan tradisional, kerajinan, mata pencaharian, bangunan/arsitektur tradisional, wisata budaya, ungkapan dan peribahasa, kerajinan, alat transportasi, dan tempat wisata (Thresnawaty et al., 2017). Pembangunan kebudayaan yang membutuhkan peran serta dari data dan informasi menyebabkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada wilayah Kabupaten Tangerang berinisiatif dalam menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun berdasarkan acuan pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO terdiri atas beberapa dimensi dan indikator yang menyoroti tentang interaksi antara kebudayaan dengan pembangunan, menilai

kondisi terkini dalam meningkatkan aset budaya dalam pembangunan, serta memperluas pilihan hidup masyarakat, dan memberikan gambaran komprehensif terkait tantangan dan peluang nasional sebagai upaya pemilihan kebijakan yang strategis dalam pemanfaatan potensi budaya (UNESCO, 2009). CDIs menjadi alat metodologi yang pragmatis dan efektif dalam memperkuat inklusi budaya sebagai strategi pembangunan. Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan mampu menggambarkan pembangunan kebudayaan secara holistik dengan memuat 7 dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pembangunan kebudayaan cukup luas dan bersifat lintas sektoral.

1.2 Rumusan Masalah

Rencana pemajuan kebudayaan sebagai sasaran pemerintah dalam menunjang pembangunan sosial-ekonomi secara berkelanjutan di Indonesia sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Tahun 2025-2045 yang menjadikan budaya sebagai landasan dalam pembangunan nasional. RPIK membahas mengenai 3 arah kebijakan meliputi pengembangan nilai budaya secara partisipatif dan inklusif, pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya secara berkelanjutan, peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi pemerintah saat ini, dilaksanakan 8 misi yang disebut Asta Cita dalam menjawab tantangan situasi global, yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi kreatif berbasis budaya serta memperkokoh harmonisasi dalam kebudayaan (Portal Informasi Indonesia, 2024). Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tidak luput dalam mengembangkan kebudayaan sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kebudayaan Daerah yang menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dikelola dan dilestarikan.

Dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait nilai kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang, maka dibutuhkanlah suatu ukuran yang akurat yang berasal dari berbagai instrumen yang jelas. Nilai yang dimaksud adalah Indeks

Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang berguna dalam perumusan kebijakan. Namun, sayangnya Kabupaten Tangerang belum pernah merilis angka terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan, sehingga tidak dapat diperoleh capaian mengenai kinerja kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang. Melalui hal tersebut maka dirumuskanlah publikasi ini yang diperoleh melalui beberapa tahapan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan yakni penggunaan 7 dimensi pembentuk yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender.

Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang, diharapkan arah pembangunan kebudayaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi serta terjamin kualitasnya. Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan/s*takeholder* dalam merumuskan basis formulasi kebijakan yang *knowledge-based*, agar kebijakan pembangunan kebudayaan yang dibentuk dapat lebih efektif dan efisien dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Tangerang. Disamping itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi terkait dengan keberagaman kebudayaan dan faktor-faktor keterkaitan antara kebudayaan dan pembangunan. Adapun peminat kajian kebudayaan dapat memperkaya wawasannya tentang data dan informasi mengenai pembangunan kebudayaan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan publikasi ini antara lain:

a. Menyajikan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
b. Menyajikan data capaian 7 dimensi dan indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
c. Membandingkan capaian nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan nilai IPK Provinsi Banten dan IPK Indonesia.

Manfaat dari penulisan publikasi ini adalah:

a. Menjadi indikator dalam hal pemantauan dan evaluasi yang berguna pada perumusan kebijakan di bidang kebudayaan oleh kementerian/lembaga.
b. Merumuskan kebijakan dan menjadi bagian dari capaian kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, terdiri dari pembahasan terkait konsep dan definisi terkait Kebudayaan, Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) beserta dimensinya.

Bab 3 Metodologi, membahas tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan metode penelitian, populasi dan sampel, cara perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) serta definisi operasional.

Bab 4 Data dan Pembahasan, membahas tentang nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), capaian IPK setiap dimensi pada wilayah Kabupaten Tangerang dan perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang dengan IPK pada Provinsi Banten dan IPK Nasional.

Bab 5 Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan terkait kajian pembangunan kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang.



TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sementara itu, kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan berjalan seiring dengan pembangunan manusia sebab bisa memberikan gambaran dinamis tentang identitas individu dan kolektif (Duxbury et al., 2016).

2.2 Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (Dewan Perwakilan Rakyat, 2017).

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b. memperkaya keberagaman budaya;
c. memperteguh jati diri bangsa;
d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
f. meningkatkan citra bangsa;
g. mewujudkan masyarakat madani;
h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

2.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan 7 Dimensi Pembentukanya

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran terkait capaian kinerja pembangunan kebudayaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kebijakan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) terbagi atas 7 dimensi pembentuk antara lain (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022):

2.3.1 Dimensi Ekonomi Budaya

Dimensi ekonomi budaya didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Nilai dimensi ekonomi budaya diperoleh dari keterlibatan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan kebudayaan masyarakat tersebut. Indikator persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Adapun rumus perhitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 15+\ yang\ pernah\ terlibat\ sebagai\ pelaku/\\ pendukung\ pertunjukan\ seni\ dan\ menjadikan\ keterlibatan\\ sebagai\ sumber\ penghasilan\end{array}}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 15+} \times 100\% \quad (1)$$

2.3.2 Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa. Dimensi pendidikan terdiri atas 6 indikator yaitu:

1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang

pernah dijalani. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^{P25+}(Lama\ sekolah\ penduduk\ ke{-}i)}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 25+} \quad (2)$$

2. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ i\ yang\ masih\ bersekolah}{Jumlah\ penduduk\ usia\ i} \quad (3)$$

3. Angka Kesiapan Sekolah adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ yang\ masih\ bersekolah\ di\ kelas\ 1\\ SD/sederajat\ dan\ tahun\ ajaran\ sebelumnya\ pernah\\ mengikuti\ pendidikan\ prasekolah\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ yang\ masih\ bersekolah\\ di\ kelas\ 1\ SD/sederajat\end{array}} \times 100\% \quad (4)$$

4. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian adalah persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau kesenian terhadap

jumlah satuan pendidikan. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ satuan\ pendidikan\ yang\ mempunyai\\ guru\ yang\ mengajar\ mulok\ bahasa\ daerah\\ dan/atau\ kesenian\end{array}}{Jumlah\ satuan\ pendidikan} \times 100\% \qquad (5)$$

5. Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah adalah persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\ penyandang\\ disabilitas\ yang\ masih\ bersekolah\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\\ penyandang\ disabilitas\end{array}} \times 100\% \qquad (6)$$

6. Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah adalah persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\ dengan\\ kategori\ kelompok\ pengeluaran\ 40\ persen\\ terbawah\ yang\ masih\ bersekolah\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\ dengan\\ kategori\ kelompok\ pengeluaran\\ 40\ persen\ terbawah\end{array}} \times 100\% \qquad (7)$$

2.3.3 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi ketahanan sosial budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Dimensi ketahanan sosial budaya terdiri atas 8 indikator yaitu:

1. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal adalah persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ setuju\ atau\\ sangat\ setuju\ jika\ ada\ sekelompok\ orang\ dari\\ agama\ lain\ yang\ melakukan\ kegiatan\\ di\ lingkungan\ sekitar\ tempat\ tinggal\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \qquad (8)$$

2. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal adalah persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ setuju\ atau\\ sangat\ setuju\ jika\ ada\ sekelompok\ orang\ dari\\ suku\ lain\ yang\ melakukan\ kegiatan\\ di\ lingkungan\ sekitar\ tempat\ tinggal\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \quad (9)$$

3. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama adalah persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ setuju\ atau\\ sangat\ setuju\ jika\ salah\ satu\ ART\ berteman\\ dengan\ orang\ lain\ yang\ beda\ agama\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \quad (10)$$

4. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku adalah persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda suku terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ setuju\ atau\\ sangat\ setuju\ jika\ salah\ satu\ ART\ berteman\\ dengan\ orang\ lain\ yang\ beda\ suku\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \quad (11)$$

5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3

bulan terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, arisan, kematian, dan kegiatan sosial lainnya) di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ mengikuti\\ kegiatan\ sosial\ kemasyarakatan\ (selain\ gotong\\ royong)\ di\ lingkungan\ sekitar\\ dalam\ 3\ bulan\ terakhir\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga\ 10+} \times 100\% \qquad (12)$$

6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yarg mengikuti gotong royong adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+yang\ mengikuti\\ kegiatan\ gotong\ royong\ di\ lingkungan\\ sekitar\ dalam\ 3\ bulan\ terakhir\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga\ 10+} \times 100\% \qquad (13)$$

7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari adalah persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan diri saat berja1an kaki sendirian di malam hari terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ merasa\ khawatir\\ dengan\ keamanan\ saat\ berjalan\ kaki\ sendirian\\ di\ malam\ hari\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \qquad (14)$$

8. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah pada tetangga adalah persentase rumah tangga yang percaya atau sangat percaya menitipkan rumah pada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain terhadap jumlah rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ percaya\ atau\ sangat\\ percaya\ menitipkan\ rumah\ pada\ tetangga\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \qquad (15)$$

2.3.4 Dimensi Warisan Budaya

Dimensi warisan budaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Dimensi warisan budaya terdiri atas 6 indikator yaitu:

1. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran adalah persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penetapan\ cagar\ budaya}{Total\ pendaftaran\ objek\ yang\ diduga\ cagar\ budaya} \times 100\% \qquad (16)$$

2. Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan adalah persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penetapan\ warisan\ budaya\ takbenda}{Total\ pendaftaran\ budaya\ takbenda} \times 100\% \qquad (17)$$

3. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari adalah persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang paling sering menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 5+\ yang\ paling\ sering \\ menggunakan\ bahasa\ daerah\ di\ rumah/ \\ dalam\ pergaulan\ sehari-hari\end{array}}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 5+} \times 100\% \qquad (18)$$

4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah\ menonton\ secara\ langsung\ setidaknya\ satu\ pertunjukan\ seni}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \quad (19)$$

5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (baik langsung maupun tidak langsung) di Indonesia dalam setahun terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+yang\ pernah\ mengunjungi\ peninggalan\ sejarah/warisan\ budaya\ di\ Indonesia}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \quad (20)$$

6. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir adalah persentase rumah tangga yang dalam 3 bulan terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menggunakan setidaknya satu produk tradisional seperti: kerajinan tradisional, busana daerah/tradisional, metode penyehatan tradisional, atau obat tradisional, terhadap total rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ memiliki\ ART\ yang\ pernah\ menggunakan\ setidaknya\ satu\ produk\ tradisional}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \quad (21)$$

2.3.5 Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi ekspresi budaya didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat. Dimensi ekspresi budaya terdiri atas 4 indikator yaitu:

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat dalam setahun terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat dalam setahun terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah\ memberikan\ saran\ atau\ pendapat\ dalam\ kegiatan\ pertemuan/rapat}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \qquad (22)$$

2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ secara\ aktif\ mengikuti\ kegiatan\ organisasi\ selain\ di\ tempat\ kerja/sekolah}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \qquad (23)$$

3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu pertunjukan/pameran satu seni sebagai pelaku/ pendukung dalam kegiatan seperti: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah \\ terlibat\ sebagai\ pelaku/pendukung \\ setidaknya\ satu\ pertunjukan\ seni\end{array}}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \qquad (24)$$

4. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir adalah persentase rumah tangga yang dalam setahun terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri setidaknya satu upacara adat seperti: kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, keagamaan, panen, atau lainnya, terhadap total rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ pernah\ menyelenggarakan \\ /menghadiri\ setidaknya\ satu\ upacara\ adat\end{array}}{Jumlah\ rumah\ tangga} \times 100\% \qquad (25)$$

2.3.6 Dimensi Budaya Literasi

Dimensi budaya literasi didefinisikan sebagai aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Dimensi budaya literasi terdiri atas 3 indikator yaitu:

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir adalah persentase penduduk usia l0 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir pernah membaca: koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, atau buku lainnya selain kitab suci (baik cetak maupun elektronik), terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah\ membaca\ buku\ selain\ kitab\ suci\ baik\ cetak\ maupun\ elektronik}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \quad (26)$$

2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan internet, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah\ mengakses\ internet}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \quad (27)$$

3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan (baik fisik maupun digital) atau pernah memanfaatkan taman bacaan masyarakat, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+\ yang\ pernah \\ mengunjungi\ perpustakaan/\ memanfaatkan \\ taman\ bacaan\ masyarakat\end{array}}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 10+} \times 100\% \qquad (28)$$

2.3.7 Dimensi Gender

Dimensi gender didefinisikan sebagai persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dimensi gender terdiri atas 3 indikator yaitu:

1. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki adalah perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terhadap TPAK laki-laki usia 15 tahun ke atas. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TPAK\ Perempuan}{TPAK\ Laki-laki} \times 100 \qquad (29)$$

2. Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat adalah perbandingan persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat terhadap persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\substack{Persentase\ perempuan\ usia\ 25+\ yang\ memiliki \\ ijazah\ minimal\ SMA/sederajat}}{\substack{Persentase\ laki-laki\ usia\ 25+\ yang\ memiliki \\ ijazah\ minimal\ SMA/sederajat}} \times 100 \qquad (30)$$

3. Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki adalah perbandingan jumlah anggota parlemen (anggota DPRD Kabupaten untuk level kabupaten) perempuan terhadap laki-laki. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ anggota\ DPRD\ Kabupaten\ perempuan}{Jumlah\ anggota\ DPRD\ Kabupaten\ laki-laki} \times 100 \qquad (31)$$



METODOLOGI

BAB 3
METODOLOGI

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup publikasi ini mencakup Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang dengan melakukan analisis pada 7 dimensi pembentuk serta perbandingan antarwaktu dan antarwilayah dengan IPK Provinsi Banten maupun IPK Nasional. Sumber data yang digunakan adalah pendataan primer terkait Survei Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 dan tabulasi hasil pendataan Susenas Kor Maret 2025, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, diperoleh data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

3.2 Jenis Data dan Metode Penelitian

Penelitian mengenai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dilakukan untuk memperoleh angka terkait gambaran terkait kinerja pembangunan kebudayaan dari sebagian responden yang mewakili kinerja budaya pada populasi masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun jenis data dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbasis data primer yang dikumpulkan langsung dari hasil Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, serta data sekunder yang berasal dari tabulasi data mikro Susenas Kor Maret 2025 dan Sakernas Agustus 2024. Disamping data primer, juga digunakan data sekunder pada penelitian ini berupa data registrasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keseluruhan data tersebut selanjutnya akan diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS untuk disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

3.2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas metode pengumpulan data, metode penarikan sampel, dan metode analisis. Penjelasan untuk setiap tahap metode sebagai berikut:

3.2.2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data pembangunan kebudayaan adalah wawancara langsung. Wawancara dilakukan secara *door-to-door* untuk setiap rumah tangga sampel dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pelaksanaan Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Selain metode wawancara, juga dilakukan pengumpulan data dengan metode kompilasi data yang berasal dari

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2025 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.

3.2.2.2. Metode Penarikan Sampel

Penentuan jumlah sampel didasarkan pada penggunaan rumus slovin. Rumus slovin adalah pehitungan yang digunakan terkait jumlah minimal sampel yang harus digunakan dalam suatu populasi dengan tingkat toleransi kesalahan yang dipilih. Adapun rumus slovin dituliskan sebagai berikut (Selvilla et al., 1992):

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persentase toleransi kesalahan (digunakan nilai $e = 0{,}05$)

Dasar penentuan sampel dituliskan seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tahapan penentuan sampel

Tahap	Unit	Jumlah Unit		Metode Pemilihan Sampel	Peluang	Fraksi Sampling
		Populasi	Sampel			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rukun Tetangga (RT)	N_h	n_h	PPS *size* M_{hi}	$\frac{M_{hi}}{M_h}$	$n_h \times \left[\frac{M_{hi}}{M_h}\right]$
2	Keluarga	M_{hi}	m_{hi}	*Systematic*	$\frac{1}{m_{hi}}$	$\frac{m_{hi}}{M_{hi}}$

Keterangan:

N_h = Jumlah rukun tetangga (RT) di strata h ($h = 1$ untuk daerah perkotaan dan $h = 2$ untuk daerah perdesaan)

n_h = Jumlah sampel rukun tetangga (RT) di strata h

M_h = Jumlah populasi keluarga pada strata h

M_{hi} = Jumlah populasi keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i

m_{hi} = Jumlah sampel keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i

Secara detail tahapan pengambilan sampel pada Survei Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 antara lain:

Tahap 1:

Memilih sebanyak n_h dari blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS)*, dengan *size* jumlah populasi keluarga pada strata h rukun tetangga (RT) i dari hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020. Pemilihan dilakukan secara independen antara strata perkotaan dan strata perdesaan di Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemilihan ini, diperoleh *Master Sampling Frame* blok sensus. Memilih sejumlah m_{hi} blok sensus sesuai alokasi secara *systematic sampling* pada setiap strata perkotaan dan strata perdesaan di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang untuk kegiatan Survei Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala keluarga.

3.2.2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dapat menggambarkan kondisi setiap dimensi dan indikator secara sederhana, tetapi memberikan informasi yang bermakna. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data menjadi berbentuk grafik, tabel dan narasi, sehingga dapat dianalisis secara visual mengenai pola perkembangan pada data penelitian. Gambaran umum dari dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi literasi budaya, dan dimensi gender dapat memberikan informasi mendalam terkait penelitian ini yaitu pembangunan kebudayaan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang adalah seluruh penduduk Kabupaten Tangerang. Sementara itu, sampel yang digunakan pada

penelitian ini diperoleh dengan metode penarikan sampel 2 tahap berstrata *(Stratified Two Stage Sampling)* terbagi atas tahap 1 yaitu *Probability Proportional to Size (PPS)*, yang dilakukan secara independen antara strata perkotaan dan strata perdesaan di Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahap 2 dilakukan *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala keluarga.

Stratifikasi dilakukan di seluruh populasi blok sensus dan pada keluarga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (*explicit stratification*), sedangkan *implicit stratification* diterapkan pada level keluarga.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan.
2. *Implicit stratification* keluarga di blok sensus terpilih dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala keluarga untuk meningkatkan keterwakilan dari keragaman karakteristik sosial ekonomi keluarga.

Adapun kerangka sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:
   a. Daftar populasi blok sensus biasa 2020 yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan.
   b. Daftar 40% blok sensus 2020 yang terpilih sebagai *Master Sampling Frame*.

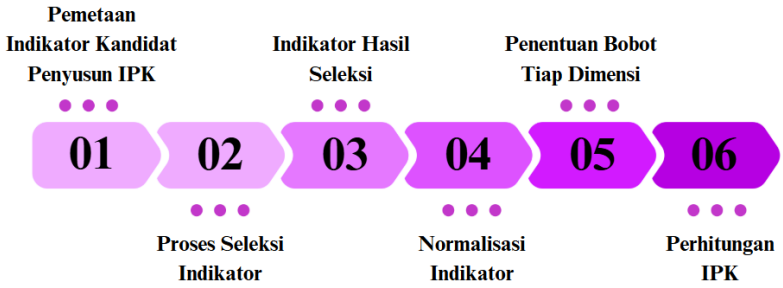
c. Daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2025.

2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar populasi keluarga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala keluarga hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih.

Jumlah sampel Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 2025 adalah 400 keluarga. Pada setiap blok sensus terpilih dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 keluarga, sehingga diperlukan 40 blok sensus sebagai sampel Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 2025 yang tersebar merata di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang.

3.4 Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Secara umum, langkah-langkah penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah melakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, proses seleksi indikator sehingga diperoleh indikator hasil seleksi, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap dimensi, dan penghitungan IPK.



Gambar 1. Tahapan perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan

Adapun tahapan perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara rinci sebagai berikut:

3.4.1 Pemetaan Indikator Penyusun IPK

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun dengan mengacu pada *framework Culture Development Indicators* (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Berdasarkan *framework* tersebut, CDIs disusun oleh 22 indikator yang dikelompokkan dalam 7 dimensi. Tujuh dimensi tersebut diimplementasikan secara global, meliput Dimensi Ekonomi, Pendidikan, Kepemerintahan, Partisipasi Sosial, Keadilan Gender, Komunikasi, dan Warisan Budaya.

Berdasarkan dimensi CDIs tersebut, dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, sehingga diperoleh 40 indikator awal penyusun IPK, yang dikelompokkan dalam 8 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Tata Kelola Budaya. Pemetaan indikator kandidat tiap dimensi tersebut dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di Kabupaten Tangerang serta ketersediaan data secara kontinyu.

Indikator-indikator dalam dimensi tersebut datanya bersumber dari hasil survei BPS dan data dari kementerian lainnya. Data yang berasal dari BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR 2024 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024. Sedangkan data dari kementerian lainnya berupa data registrasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, pengumpulan data Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 2025 dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

3.4.2 Proses Seleksi Indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator terpilih yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Tujuannya agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana, namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan. Pemilihan indikator diawali dengan identifikasi indikator kandidat yang secara substantif sesuai dengan konsep dimensi yang dibangun. Indikator yang diambil hendaknya mempertimbangkan aspek ketersediaan data. Pada proses identifikasi indikator penyusun IPK diperoleh 40 indikator.

Selanjutnya, dilakukan proses seleksi indikator terhadap 40 indikator kandidat menggunakan teknik statistik analisis faktor. Melalui analisis faktor dapat diketahui matriks hubungan

antar sejumlah indikator. Matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequancy* (MSA). Pengujian ini dilakukan untuk menyeleksi indikator-indikator yang akan masuk dalam penghitungan IPK. Suatu indikator akan terpilih sebagai indikator penyusun indeks apabila memiliki hubungan yang kuat dengan indikator lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MSA $\geq 0{,}5$. Sebaliknya, indikator yang memiliki hubungan lemah nilai MSA $< 0{,}5$ akan dikeluarkan dari penghitungan IPK. Analisis faktor ini dilakukan terhadap masing-masing dimensi secara terpisah.

Proses pemilihan indikator tidak mutlak hanya berdasarkan teknik statistik. Melainkan menggunakan tahapan lain dalam proses seleksi variabel yaitu mempertimbangkan teori substansi dari indikator tersebut. Pertimbangan ini dilakukan melalui diskusi oleh para ahli atau disebut *expert judgment*. Apabila secara teori substansi indikator tersebut penting sebagai penyusun indeks, maka indikator tersebut akan tetap digunakan meskipun secara teknik statistik dianggap tidak layak masuk sebagai penyusun indeks. Dalam penyusunan IPK, selain menggunakan analisis faktor, seleksi indikator ini juga menggunakan diskusi para ahli terkait dimensi serta indikator-indikator yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan. Beberapa ahli yang turut serta dalam proses diskusi diantaranya perwakilan dari Bidang Penelitian Kebudayaan, Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, serta Bidang Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan

Kebudayaan Bappeda. Salah satu yang menjadi dasar penentuan indikator tersebut adalah target RPJMN serta program-program pemerintah terkait pembangunan kebudayaan.

3.4.3 Indikator Hasil Seleksi

Berdasarkan hasil seleksi variabel dengan *menggunakan Measure Sampling Adequancy* (MSA) dan *expert judgment* diperoleh 31 indikator yang tersebar pada 7 dimensi. Adapun rincian indikator yang terpilih pada 7 dimensi pembentuk yaitu:

1) Dimensi Ekonomi Budaya
   - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).

2) Dimensi Pendidikan
   - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas;
   - Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun keatas;
   - Angka Kesiapan Sekolah;
   - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian;
   - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah;

- Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah.

3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya
   - Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
   - Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
   - Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama;
   - Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku;
   - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong;
   - Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir;

- Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga.

4) Dimensi Warisan Budaya
   - Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi;
   - Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi;
   - Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah;
   - Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional.

5) Dimensi Ekspresi Budaya
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi;

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni;
- Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

6) Dimensi Budaya Literasi
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir;
   - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

7) Dimensi Gender
   - Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki;
   - Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat;
   - Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.

3.4.4 Normalisasi Indikator

Sebelum penghitungan indeks, tahapan yang harus dilakukan adalah normalisasi data. Tujuan dari normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik. Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah metode *Max-Min*. Untuk menggunakan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indikator. Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Sementara itu, nilai minimum menjadi batas nilai terendah yang dapat dimiliki suatu indikator. Penentuan nilai minimum dan maksimum dapat mengacu pada literatur yang sudah digunakan secara global, atau berdasarkan target-target yang ditetapkan dalam RPJMN. Apabila tidak ada dasar untuk penentuan nilai minimum dan maksimum, maka dapat digunakan pendekatan data empiris yaitu dengan memanfaatkan nilai tertinggi dari sebaran data per provinsi ditambah dengan standard deviasi. Tabel 2 menunjukkan nilai maksimum dan minimum setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IPK 2025. Selanjutnya, setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu berkisar antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur secara merata antara 0 dan 100.

Dalam proses normalisasi perlu dipertimbangkan sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya positif atau negatif. Suatu indikator memiliki arah positif jika semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Sebaliknya, suatu indikator berarah negatif apabila semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin buruk. Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi menggunakan Persamaan (32) untuk data positif dan Persamaan (33) untuk data negatif. Adapun persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator adalah sebagai berikut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018):

(untuk indikator yang bersifat positif):

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100 \qquad (32)$$

(untuk indikator yang bersifat negatif) :

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100 \qquad (33)$$

Keterangan:

SX_i = Nilai indikator i yang sudah dinormalisasi

X_i = Nilai indikator i (empiris)

$X_{i.min}$ = Nilai minimal indikator i (ditetapkan)

$X_{i.max}$ = Nilai maksimal indikator i (ditetapkan)

3.4.5 Penentuan Bobot Tiap Dimensi

Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para pakar tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Adapun beberapa metode pembobotan yang ada sebagai berikut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018):

1) Penilaian Para Pakar

   Penilaian para pakar adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan para pakar terkait suatu aspek tertentu dalam mengukur indeks.

2) Proses Hierarki Analisis (*Analytical Hierarchy Process*/ AHP)

   Proses Hierarki Analisis (AHP) adalah teknik yang terstruktur untuk mengelola dan menganalisis keputusan yang kompleks. AHP membantu para pengambil keputusan untuk menentukan pembobotan yang terbaik untuk dimensi dan indikator dengan melakukan analisis masalah dalam kerangka kerja yang komprehensif dan rasional.

3) Pendekatan Keuntungan dari Keraguan (*Benefit of the doubt approach*/ BOD)

Pendekatan ini adalah aplikasi dari *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap indikator komposit berdasarkan keuntungan dari setiap dimensi dan indikator.

4) Pendapat umum/opini publik

Metode opini publik merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu negara mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran mayoritas masyarakat.

5) Proses Alokasi Anggaran (*Budget Allocation Process*/ BAP)

Proses Alokasi Anggaran (BAP) merupakan metode pembobotan indikator berdasarkan persentase dari anggaran untuk setiap dimensi dan indikator.

6) Metode Statistik Multivariasi (*Multivariate Statistical Methods*)

Metode ini menganalisis gabungan perilaku dari berbagai variabel (indikator) yang dipilih secara random. Keanekaragaman dari sebuah variabel random akan dievaluasi secara bersamaan untuk mendeteksi perilaku dari berbagai indikator. Beberapa kemungkinan metode statistik multivariatif antara lain: *Principle components analysis* (PCA), *Factor analysis, Cluster analysis, Multivariate analysis of variance* (MANOVA), *Discriminant analysis,*

Data envelopment analysis (DEA), *Unobserved components model* (UCM) dan *Conjoint analysis* (CA).

Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi yang dipilih menggunakan metode statistik multivariat (*multivariate statistical methods*) melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar. Bobot yang digunakan masing-masing dimensi sebagai berikut.

Tabel 2. Pembobotan dimensi untuk menghitung nilai IPK

Dimensi	% Bobot
(1)	**(2)**
Dimensi 1 Ekonomi Budaya	10%
Dimensi 2 Pendidikan	20%
Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya	20%
Dimensi 4 Warisan Budaya	25%
Dimensi 5 Ekspresi Budaya	10%
Dimensi 6 Budaya Literasi	10%
Dimensi 7 Gender	5%

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018)

3.4.6 Perhitungan IPK

Langkah berikutnya dalam penghitungan IPK adalah memperoleh nilai indeks dimensi. Indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) * 100 \quad (34)$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi

n_j = Banyaknya indikator dimensi ke-j

Selanjutnya nilai IPK dihitung dengan cara menghitung indeks dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi, sehingga penghitungan IPK mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi. Penghitungan menggunakan Persamaan (35) berikut:

$$IPK = \sum_{j=1}^{7}\left(W_j * Indeks\ D_j\right) \quad (35)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan

$Indeks\ D_j$ = Indeks dimensi ke-j

D_j = Dimensi ke-j

W_j = Bobot dimensi ke-j

Nilai akhir dari hasil penghitungan IPK dalam Persamaan (35) digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan pada wilayah Kabupaten Tangerang.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 1. Ekonomi Budaya (D1)						
1	$X_{1.1}$	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0	1	Nilai maksimum empiris + standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
Dimensi 2. Pendidikan (D2)						
2	$X_{2.1}$	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+	0	15	Standar UN dan sudah digunakan di IPM	Susenas KOR, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
3	$X_{2.2}$	Harapan lama sekolah penduduk usia 7+	0	18	Standar UN dan sudah digunakan di IPM	Susenas KOR, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
4	$X_{2.3}$	Angka Kesiapan Sekolah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK (lanjutan)

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 2. Pendidikan (D2)						
5	$X_{2.4}$	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian	0	45	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Kemdikbud setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
6	$X_{2.5}$	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
7	$X_{2.6}$	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)						
8	$X_{3.1}$	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
9	$X_{3.2}$	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
10	$X_{3.3}$	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK (lanjutan)

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)						
11	$X_{3.4}$	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
12	$X_{3.5}$	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
13	$X_{3.6}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
14	$X_{3.7}$	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
15	$X_{3.8}$	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK (lanjutan)

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 4. Warisan Budaya (D4)						
16	$X_{4.1}$	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Kemdikbud setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
17	$X_{4.2}$	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Kemdikbud, setiap tahun, nasional, provinsi, dan kabupaten
18	$X_{4.3}$	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	0	100	Standar	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
19	$X_{4.4}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	0	70	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
20	$X_{4.5}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0	30	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
21	$X_{4.6}$	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK (lanjutan)

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 5. Ekspresi Budaya (D5)						
22	$X_{5.1}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	0	30	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
23	$X_{5.2}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	20	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
24	$X_{5.3}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni	0	7	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
25	$X_{5.4}$	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	0	45	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)						
26	$X_{6.1}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	0	70	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Tabel 3. Daftar indikator hasil seleksi, batas minimum dan maksimum, sumber dan ketersediaan data IPK (lanjutan)

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)						
27	$X_{6.2}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	0	85	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
28	$X_{6.3}$	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	0	25	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
Dimensi 7. Gender (D7)						
29	$X_{7.1}$	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Standar	Sakernas, setiap tahun, nasional dan provinsi
30	$X_{7.2}$	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
31	$X_{7.3}$	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	0	100	Standar	KPU-BPS, setiap tahun, nasional dan provinsi

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang

52,97

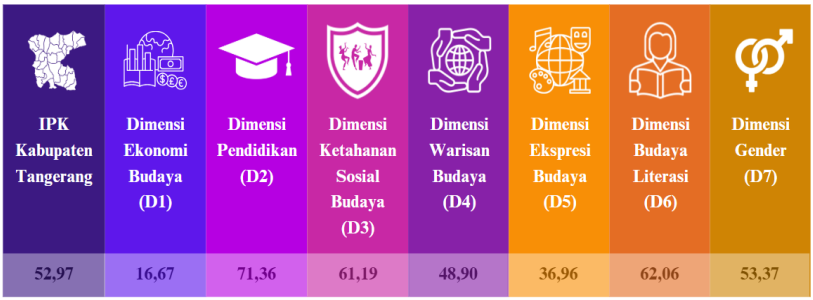


Dimensi Ekonomi Budaya	16,67
Dimensi Pendidikan	71,36
Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	61,19
Dimensi Warisan Budaya	48,90
Dimensi Ekspresi Budaya	39,96
Dimensi Budaya Literasi	62,06
Dimensi Gender	53,37

BAB 4

DATA DAN PEMBAHASAN

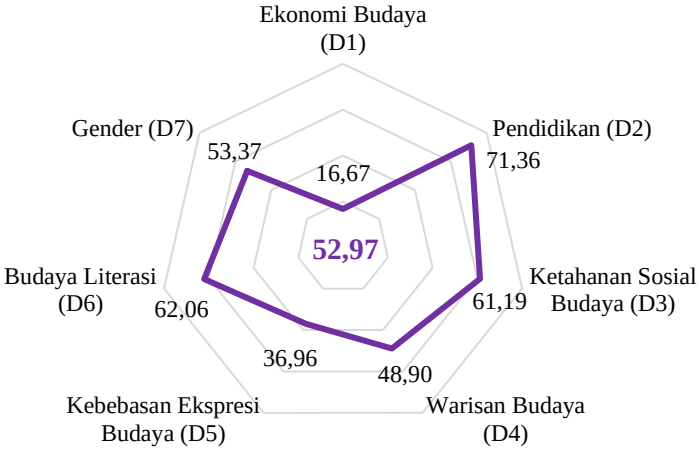
4.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang



Indeks Pembangunan Kebudayaan wilayah Kabupaten Tangerang berguna dalam menggambarkan kinerja pembangunan kebudayaan pada wilayah Kabupaten Tangerang. Pembangunan kebudayaan yang terbentuk bukan hanya berguna dalam meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan, tetapi mampu menyumbang investasi tersendiri terhadap peradaban bangsa. Mengingat kondisi tersebut maka pembangunan kebudayaan mendapatkan perhatian dari pemerintah serta pemerhati budaya, dalam rangka mewujudkan sinergitas kontribusi unsur kebudayaan pada pemerataan pembangunan ekonomi. Penghitungan IPK pada tahun 2025 akan berdasar pada berbagai sumber informasi yang dominan berasal dari Survei Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 2025, sedangkan sisanya bersumber dari Susenas KOR dan Sakernas Kabupaten Tangerang 2025 dan data kementerian lain.

Berdasarkan hasil perhitungan skor capaian IPK Kabupaten Tangerang 2025 sebesar 52,97 poin. Dimensi pendidikan memiliki capaian nilai tertinggi, sedangkan dimensi ekonomi budaya menjadi dimensi dengan nilai terendah. Secara umum, capaian IPK Kabupaten Tangerang masih berada pada kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat guna mengoptimalkan peran pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tangerang.

IPK Kabupaten Tangerang 2025 dinilai berhasil dalam mengakomodasi segenap unsur kebudayaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri atas 7 dimensi, mencakup Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Ketujuh dimensi penyusun yang terpilih tersebut berlandaskan pada standar baku pengukuran kebudayaan secara internasional yang dimuat pada *Cultural Development Indicators* (CDIs) hasil UNESCO dengan melakukan beberapa penyesuaian tertentu terhadap unsur-unsur kebudayaan di wilayah Kabupaten Tangerang. Seleksi indikator pada setiap dimensi juga dimaksud agar dapat dilakukan keterbandingan dengan hasil perhitungan IPK pada Provinsi Banten maupun IPK pada level nasional. Hasil perhitungan IPK diharapkan dapat memuat pokok-pokok kebudayaan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



Gambar 2. Dimensi penyusun IPK Kabupaten Tangerang, 2025

Pada 7 dimensi yang dibentuk terlihat bahwa nilai antardimensi cenderung mirip, tetapi ada kesenjanganan yang cukup tinggi pada dimensi ekonomi budaya (Gambar 2). Adapun dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi pendidikan sebesar 71,36 poin, diikuti dimensi budaya literasi sebesar 62,06 poin, dan dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 61,19 poin. Nilai dimensi pendidikan yang tinggi menunjukkan semakin baiknya pemenuhan pendidikan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tangerang. Sementara itu, besaran nilai pada dimensi budaya literasi yang tergolong baik terkait literasi membaca, akses terhadap internet, dan kunjungan ke perpustakaan fisik maupun digital. Begitu juga dengan dimensi ketahanan sosial budaya berarti bahwa kemampuan suatu kebudayaan yang berhasil dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas,

pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat Kabupaten Tangerang berlangsung dengan kriteria nilai baik. Disisi lain, dimensi ekonomi budaya menghasilkan nilai indeks terendah sebesar 16,67 poin yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) masih kurang baik.

Dimensi-dimensi yang digunakan dalam perhitungan hasil IPK berasal dari beberapa indikator, sehingga variasi capaian yang diperoleh berbeda-beda. Contohnya dimensi ekonomi budaya yang hanya dibentuk oleh 1 indikator saja (Tabel 4), yaitu persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan berasal dari perananannya sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang nilainya relatif rendah sebesar 0,17 persen. Dimensi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa. Unsur pendidikan yang masuk dalam dimensi ini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal dengan banyaknya indikator sejumlah 7 indikator. Dimensi budaya literasi digambarkan melalui 3 indikator terkait dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan budaya literasi dan kunjungan ke perpustakaan. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial terbentuk dari 8 indikator dengan angka yang bersumber dari rumah tangga, masyarakat dan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menjadi indikator yang terbesar ketiga sumbangannya dalam membentuk nilai IPK Kabupaten Tangerang.

Tabel 4. Capaian dimensi dan indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang, 2025

Dimensi/Indikator	Nilai	Target
(1)	(2)	(3)
1. Ekonomi Budaya	**16,67**	
- Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni (persen)	0,17	1
2. Pendidikan	**71,36**	
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+ (tahun)	9,06	15
- Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,88	18
- Angka Kesiapan Sekolah (AKS) (persen)	62,06	100
- Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian (persen)	42,44	45
- Penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah (persen)	49,03	100
- Penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah (persen)	90,82	100
3. Ketahanan Sosial Budaya	**61,19**	
- Rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal (persen)	57,63	100
- Rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal (persen)	72,88	100
- Rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama (persen)	79,55	100

Tabel 4. Capaian dimensi dan indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang, 2025 (lanjutan)

Dimensi/Indikator	Nilai	Target
(1)	(2)	(3)
3. Ketahanan Sosial Budaya	**61,19**	
- Rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku (persen)	87,57	100
- Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (persen)	81,59	100
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong (persen)	34,97	100
- Rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari (persen)	44,14	50
- Rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumahnya kepada tetangga (persen)	63,62	100
4. Warisan Budaya	**48,90**	
- Benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan (persen)	0	50
- Warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (persen)	10	50
- Penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah/dalam pergaulan sehari-hari (persen)	49,94	100
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni (persen)	40,07	70
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (persen)	21,85	30
- Rumah tangga yang menggunbakan produk tradisional	88,70	95

Tabel 4. Capaian dimensi dan indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang, 2025 (lanjutan)

Dimensi/Indikator	Nilai	Target
(1)	(2)	(3)
5. Ekspresi Budaya	**36,96**	
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat (persen)	43,35	30
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi (persen)	2,78	20
- Penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni (persen)	0,79	7
- Rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat (persen)	10,17	45
6. Budaya Literasi	**62,06**	
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik (persen)	34,71	70
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet (persen)	79,63	85
- Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat (persen)	10,73	25
7. Gender	**53,37**	
- Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki (persen)	55,49	100
- Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat (persen)	79,61	100
- Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki (persen)	25,00	100

Dengan mengetahui beberapa indikator yang memengaruhi dimensi penyusun IPK, maka dapat diketahui hal-hal apa saja yang menjadi prioritas dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan, khususnya terkait program-program kerja Kementerian/Lembaga pada bidang kebudayaan.

4.2 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2025



Dimensi ekonomi budaya hanya diwakili oleh 1 nilai indikator yaitu indikator persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan dari keterlibatannya sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Nilai dimensi ini diperoleh sebesar 16,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi budaya di Kabupaten Tangerang masih tergolong kurang. Kondisi ekonomi budaya pada wilayah Kabupaten Tangerang masih membutuhkan lebih banyak upaya dalam mendorong pemanfaatan budaya sebagai sumber penghasilan masyarakat. Pemanfaatan budaya dalam perekonomian disebut juga sebagai ekonomi kreatif yang menggabungkan nilai-nilai budaya, seni dan warisan lokal dalam upaya menciptakan produk dan layanan baru (Nuryadin, 2024).

Peranan ekonomi budaya juga berkaitan dengan pariwisata sejalan dengan penelitian Tjeme (2024), dimana beberapa faktor yang dapat memengaruhi rendahnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya antara lain produk ekonomi budaya yang disajikan kurang kreatif, kurangnya promosi dan *branding* produk, minimnya kolaborasi dan kemitraan antara pelaku budaya dengan pelaku ekonomi, dan rendahnya dukungan dari pihak pemerintah dan lembaga terkait. Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pengembangan ekonomi kreatif (berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi) dapat dilakukan melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitas pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitas kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas.



Dimensi Pendidikan (D2)
71,36 poin

Dimensi pendidikan menggambarkan capaian pendidikan masyarakat yang dimiliki di Kabupaten Tangerang. Nilai dimensi pendidikan yang dihasilkan memperoleh nilai sebesar 71,36 poin termasuk kategori baik. Kondisi tersebut berarti capaian pendidikan masyarakat telah berhasil terpenuhi dengan baik yang dilihat dari nilai rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka kesiapan sekolah,

satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian, penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah, dan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah. Indikator yang memberikan sumbangan nilai tertinggi adalah persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah sebesar 90,82 persen. Besarnya nilai indikator tersebut memiliki makna bahwa penduduk yang termasuk pada 40% pengeluaran terbawah dengan usia berkisar 7 sampai dengan 18 tahun yang masih bersekolah sebanyak 90,82 persen daripada jumlah penduduk kategori tersebut.

Nilai yang terendah ada pada rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas sejumlah 9,06 tahun. Maka dari itu, rata-rata lama sekolah yang berhasil diselesaikan kira-kira 9 sampai 10 tahun berarti sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Tangerang hanya berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) atau memasuki jenjang sekolah menengah atas (SMA) tetapi tidak lulus. Nilai rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya angka putus sekolah. Anak putus sekolah mencerminkan anak-anak yang berada pada usia sekolah, tetapi sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu (BPS Provinsi Bali, 2012). Anak yang putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, ekonomi, pemahaman akan pentingnya pendidikan, budaya, ketersediaan sarana prasarana dan lain sebagainya (BPS Kabupaten Karanganyar, 2023). Penelitian Khairani et al. (2025) juga mendukung bahwa faktor sosial-

ekonomi, budaya-tradisi, kurangnya infastruktur dan tenaga pengajar serta sistem pendidikan. Walaupun demikian, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas yang dicapai Kabupaten Tangerang tidak jauh berbeda dengan nilai Provinsi Banten yang sebesar 9,15 di tahun 2023 dan 9,23 di tahun 2024. Sementara itu, nilai rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas Kabupaten Tangerang masih lebih besar dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,77 tahun 2023 dan 8,85 tahun 2024.

Nilai indikator yang justru membutuhkan perhatian adalah persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah dengan nilai 49,03 persen, nilai ini memiliki selisih yang cukup jauh dengan angka Provinsi Banten dan angka nasional. Angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peranan pemerintah daerah dan sekolah, tingkat kesulitan penyandang disabilitas, wilayah tinggal, ketersediaan sekolah inklusi, serta rata-rata lama sekolah (Dewi & Jasmina, 2023). Dimana penduduk penyandang disabilitas di wilayah perkotaan/urban lebih banyak memiliki partisipasi sekolah daripada wilayah perdesaan, hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Tangerang yang memiliki jumlah desa lebih banyak daripada kelurahan. Selain itu kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pendidikan penduduk kelompok ini, dimana tercatat pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan mencapai 502 dari total 585 jumlah penyandang disabilitas (Kementerian PPN Bappenas, 2023b, 2023a).



Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (D3) 61,19 poin

Dimensi ketahanan sosial budaya memberikan gambaran terkait kemampuan suatu budaya untuk dipertahankan dalam suatu kondisi sosial di Kabupaten Tangerang. Nilai dimensi ketahanan sosial budaya yang berhasil diperoleh Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah 61,19 poin yang tergolong dalam kategori baik. Hal ini berarti pada lingkungan sosial Kabupaten Tangerang cukup baik dalam melakukan pertahanan terkait kondisi sosial budaya. Dimensi ketahanan sosial budaya dibentuk berdasarkan 8 indikator pembentuk, dengan nilai terbesar bersumber dari persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku dengan nilai 87,57 persen. Berarti bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tangerang tidak merasa keberatan jika terdapat anggota rumah tangganya yang bersahabat dengan seseorang dari suku yang berbeda.

Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir memiliki nilai sebesar 44,14 persen yang nilainya mendekati batas nilai maksimal indikator ini. Adapun selisih nilai indikator ini cukup tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Banten maupun nasional. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kekhawatiran rumah tangga dalam berjalan kaki sendirian di malam hari pada wilayah Kabupaten Tangerang masih tergolong tinggi.

Kondisi ini disebabkan masih tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 7.392 jumlah tindak pidana di Provinsi Banten (BPS, 2024), sedangkan pada tahun 2019 dari 100.000 penduduk terdapat risiko bagi 135 orang untuk mengalami tindak pidana (BPS Provinsi Banten, 2020).



Dimensi Warisan Budaya (D4)
48,90 poin

Dimensi warisan budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan takbenda, dalam pemajuan kebudayaan. Dimensi keempat ini dihitung dari 6 indikator penyusun, dimana yang menjadi indikator penopang terbesar bagi dimensi ini adalah persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional yang bernilai 88,70 persen. Kondisi ini sebab terdapat banyak dukungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menggunakan produk tradisional seperti topi bambu dan sepatu batik yang merupakan produk tradisional unggulan khas Kabupaten Tangerang (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2024c, 2025).

Nilai yang membutuhkan perhatian adalah persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi. Diperoleh bahwa belum ada

benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan, sedangkan warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan hanya sebesar 10 persen. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan usaha optimalisasi dalam penetapan kedua indikator tersebut. Hal ini menyebabkan turunnya rata-rata capaian dimensi warisan budaya. Walaupun demikian secara umum, dimensi warisan budaya bernilai 48,90 poin yang tergolong cukup, berarti warisan budaya berhasil cukup baik untuk dijaga dan dilestarikan oleh seluruh pihak baik warisan budaya benda dan takbenda.



Dimensi Ekspresi Budaya (D5)
36,96 poin

Seluruh manusia memiliki hak secara bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat, khususnya pada bidang budaya. IPK dapat mengakomodasi hak tersebut melalui dimensi kelima, yakni dimensi ekspresi budaya. Dimensi ini memuat kebebasan ekspresi manusia dalam budaya termasuk menganut ekspresi budaya tanpa mendapat gangguan. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir menjadi indikator penyumbang terbesar pada dimensi ini dengan nilai sebesar 43,35 persen. Nilai ini lebih besar daripada nilai maksimum yang ditetapkan yaitu 30 persen, sehingga diperoleh informasi bahwa tingkat keaktifan penduduk usia 10 tahun ke atas tergolong tinggi dalam memberikan saran dan pendapat pada kegiatan

rapat. Walaupun demikian, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni justru bernilai rendah hanya sebesar 0,79 persen, berarti tingkat keaktifan tergolong rendah dari sisi kebudayaan. Hal ini sebab keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan seni budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suasana, pelaksanaan industri kreatif, dan keberadaan akses. Faktor-faktor tersebut akan lebih menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), sedangkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang masih berupa desa.

Nilai dimensi ekspresi budaya diperoleh sebesar 48,09 poin dengan kategori cukup. Ekspresi budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Tangerang tergolong sedang pada pelaksanaanya, sehingga dibutuhkan lebih banyak peran serta dari pemerintah maupun pihak terkait dalam mendorong tingkat partisipasi ekspresi budaya masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan demi mewujudkan peningkatan dimensi ini yaitu harus dipilih suatu potensi budaya yang dapat dikembangkan lagi, pembuatan gerakan budaya untuk menstimulasi kesadaran masyarakat, dan penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).



Dimensi Budaya Literasi (D6)
62,06 poin

Dimensi penyusun keenam adalah dimensi budaya literasi. Dimensi ini memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Capaian dimensi budaya literasi mencapai 62,06 poin yang tergolong dalam kagetori baik. Bedasarkan 3 indikator penyusun dimensi budaya literasi, kegiatan mengakses internet yang dilakukan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas dalam tiga bulan terakhir (79,63 persen) menjadi penyumbang terbesar dimensi ini. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat akses penduduk terhadap internet penduduk di Kabupaten Tangerang tergolong tinggi. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran oleh masrayakat akan pentingnya mengakses internet di era digital. Adapun pada penelitian diperoleh bahwa alasan yang menjadi penyebab peningkatan akses internet adalah kebutuhan akan informasi, komunikasi jarak jauh, hiburan, mencari berita terkini, edukatif, berbelanja, interaksi sosial, kesehatan, dan sebagainya (Prasetiyo et al., 2024).

Nilai indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat bernilai paling rendah sebesar 10,73 persen yang nilainya masih lebih besar daripada capaian level provinsi. Disisi lain, hasil perhitungan

indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir memiliki selisih nilai yang cukup timpang dengan nilai Provinsi Banten maupun nasional tahun 2024 (proyeksi), dengan nilai masing-masing sebesar 34,71 persen; 43,53 persen; dan 48,09 persen. Adapun nilai ini masih berada di bawah batas maksimal yaitu 70 persen. Minat baca penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah, dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat baca, kurang memahami isi dari suatu bacaan, mengantuk ketika membaca, kurangnya kesadaran untuk membaca tanpa disuruh menjadi penyebab menurunnya budaya literasi (Amalyah et al., 2024). Sementara itu, penelitian Muslimin (2018) menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi rendahnya minat baca antara lain ketersediaan sarana dan prasarana untuk membaca serta tingkat pendidikan yang belum merata (putus sekolah dan buta aksara). Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Tangerang tengah berupaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat melalui berbagai program terkait salah satunya penggunaan perpustakaan digital tingkat desa (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2024b).



Dimensi Gender (D7)
53,37 poin

Dimensi terakhir dalam penyusun IPK adalah dimensi gender. Dimensi ini menyoroti adanya kesetaraan dalam persamaan hak, tanggung jawab, serta peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, 3 indikator penyusun dimensi ini senantiasa menampilkan nilai rasio yang membandingkan keterlibatan penduduk perempuan terhadap laki-laki pada beberapa lini, yaitu: pekerjaan, pendidikan, dan politik. Dari 3 indikator penyusun dimensi gender, rasio kepemilikan ijazah minimal SMA/sederajat penduduk usia 25 tahun ke atas (perempuan terhadap laki-laki) sebesar 79,61 persen memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk dimensi ini. Sedangkan nilai rasio anggota parlemen (perempuan terhadap laki-laki) memiliki kontribusi terendah hanya sebesar 25 persen. Melalui hal tersebut maka diperoleh informasi bahwa dari sisi pendidikan baik perempuan maupun laki-laki memiliki keikutsertaan yang tidak jauh berbeda, hal tersebut didukung oleh Angka Partisipasi Murni (APM) yang tidak berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan dengan nilai masing-masing pada tahun 2023 adalah 62,53 dan 64,36 (BPS Kabupaten Tangerang, 2024a). Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga menunjukkan pola yang sama dengan nilai partipasi perempuan

lebih besar dibandingkan laki-laki (BPS Kabupaten Tangerang, 2024b).

Keanggotaan parlemen antara kedua jenis kelamin masih cukup berbeda, dimana dari 100 anggota parlemen laki-laki hanya ada 25 anggota parlemen perempuan. Dimana syarat partisipasi perempuan pada parlemen seharusnya mencapai 30% dari anggota parlemen berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen seperti masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat dan rendahnya kualitas perempuan yang mumpuni. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara bersama-sama untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah (Inwantoro, 2014). Dimana melalui peningkatan peranan perempuan pada parlemen, maka akan membawa 2 dampak yaitu: Pertama, adanya kesungguhan bagi perempuan untuk berupaya terjun ke dunia politik, sehingga perempuan menyadari dan ikut turut serta pada bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara. Melalui hal tersebut maka proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan. Kedua, kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dipilih bukan hanya memilih (Tambunan, 2016). Dimensi gender bernilai 53,37 poin yang tergolong cukup dalam memperlihatkan kesetaraan keterlibatan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang.

4.3 Analisis Perbandingan IPK Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan adalah salah satu aspek yang penting dalam pembentukan suatu indeks. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) juga dihasilkan pada wilayah Provinsi Banten dan level nasional. Oleh sebab itu, dapat dilakukan perbandingan antara nilai IPK di wilayah Kabupaten Tangerang dengan keduanya. Hasil perbandingan ini dapat digunakan dalam melihat posisi IPK Kabupaten Tangerang dengan angka provinsi maupun nasional, serta melihat dimensi dan indikator mana yang menjadi keunggulan dan kelemahan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Melalui hal tersebut berikut disajikan perbandingan antara IPK Kabupaten Tangerang dengan IPK Provinsi Banten serta perbandingan antara IPK Kabupaten Tangerang dengan IPK Nasional. Analisis hasil perbandingan juga dilakukan untuk setiap indikator yang terbentuk pada 7 dimensi pembangunan kebudayaan.

4.3.1 Perbandingan dengan IPK Provinsi Banten

Tabel 5. Kriteria capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat Baik
$x \leq 20$	$20 < x \leq 40$	$40 < x \leq 60$	$60 < x \leq 80$	$80 < x \leq 100$

Tabel 6. Perbandingan nilai dimensi IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Provinsi Banten Tahun 2023-2024

Dimensi	Nilai Indeks		
	Banten 2023	Proyeksi Banten 2024*	Tangerang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Ekonomi Budaya	23,87	18	16,67
Pendidikan	70,92	71,14	71,36
Ketahanan Sosial Budaya	58,03	67,39	61,19
Warisan Budaya	50,96	54,15	48,90
Ekspresi Budaya	27,84	35,5	36,96
Budaya Literasi	60,56	74,29	62,06
Gender	54,70	57,49	53,37
IPK Total	**52,49**	**56,90**	**52,97**

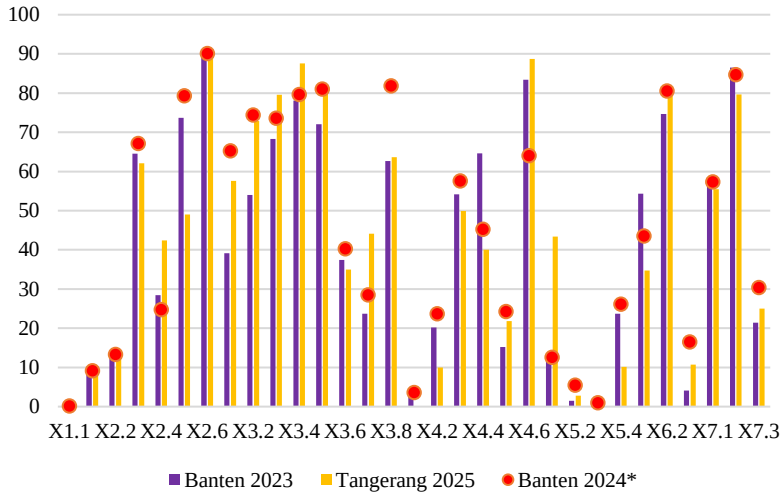
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2024)
Catatan:
* adalah nilai 2024 berdasarkan perhitungan *series data* sebelumnya

Secara umum, perbandingan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Tangerang tidak memiliki nilai yang jauh berbeda dengan besaran IPK Provinsi Banten baik pada tahun 2023 maupun hasil proyeksi tahun 2024. Walaupun demikian, diperoleh dari 7 dimensi pembentuk, 5 diantaranya memiliki nilai yang lebih rendah dengan nilai Provinsi Banten. Dimensi ekspresi budaya memiliki nilai lebih baik sebesar 36,96 poin dengan kategori sedang. Hal tersebut berarti kebebasan budaya untuk diekspresikan di wilayah Kabupaten Tangerang berlangsung lebih luas baik pada kegiatan rapat, organisasi, pertunjukan seni maupun upacara adat.

Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan kenanekaragaman unsur budaya betawi, sunda dan cina, dimana perbedaan karakteristik seni dan komunitas etnis ini menjadi salah satu penyebab munculnya keberagaman ekspresi budaya di masyarakat (Thresnawaty et al., 2017). Dimensi pendidikan juga bernilai sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi sebesar 71,36 poin dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan seberapa baiknya pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang. Penelitian Andrianto (2017) mendukung hal tersebut, dimana pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan upaya guna menunjang terselenggaranya program wajib belajar dua belas tahun melalui pemberian Kartu Tangerang Pintar, menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang menengah dengan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP), dan bantuan sosial biaya personal pendidikan.

Secara umum semua kategori yang diperoleh pada capaian dimensi IPK Kabupaten Tangerang sama baiknya dengan IPK Provinsi Banten, sehingga menunjukkan perolehan nilai yang sebanding untuk wilayah Kabupaten Tangerang baik untuk dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, maupun gender. Nilai yang masih membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah adalah peningkatan dimensi ekonomi budaya yang masih berada pada ketegori kurang. Dimana pemanfaatan budaya untuk menghasilkan sumber penghasilan di Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya

diberdayakan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penduduk Kabupaten Tangerang yang sebagian besar bekerja pada bidang Industri Pengolahan dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebanyak 40.305,36 milyar rupiah, sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya (termasuk rekreasi) yang besar keterkaitannya dengan pemanfaatan budaya hanya menyumbang masing-masing hanya sebesar 3,27 persen, 1,7 persen, 1,5 persen pada perekonomian Kabupaten Tangerang (BPS Kabupaten Tangerang, 2025). Upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang pertumbuhan kontribusi ekonomi pada bidang budaya menurut Rakib (2017) antara lain penataan kawasan tradisional, peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan sosial budaya, perbaikan kualitas produk industri kreatif berbasis budaya, peningkatan promosi wisata, penyediaan pusat informasi terkait kebudayaan lokal, serta peningkatan sumber daya manusia. Walaupun demikian, diperlukan lebih banyak upaya untuk mendorong peningkatan setiap dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Tangerang karena belum terdapat nilai dimensi yang berkategori amat baik.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2024)
Catatan:
* adalah nilai 2024 berdasarkan perhitungan *series data* sebelumnya

Gambar 3. Grafik batang perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Provinsi Banten Tahun 2023-2024

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar nilai indikator penyusun Indeks Pembangunan Kabudayaan (IPK) tahun 2025 lebih besar dibandingkan nilai Provinsi Banten 2023, tetapi lebih rendah daripada hasil proyeksi nilai di tahun 2024. Hal ini masih membutuhkan dukungan dari semua *stakeholder* terkait upaya peningkatan nilai indikator penyusun IPK Kabupaten Tangerang. Dominasi indikator bernilai serupa, tetapi ada beberapa kasus dengan pola yang berbeda. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan

capaian proyeksi Provinsi Banten tahun 2024 dengan selisih sebesar 30,74 persen. Partisipasi seseorang dalam rapat dapat dipengaruhi beberapa hal seperti kecenderungan untuk bersosialisasi, mengasah kemampuan, efisiensi waktu untuk mencapai sasaran, dan memperoleh wawasan baru dari orang lain (BPS Provinsi Maluku Utara, 2019). Data persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dengan kecenderungan nilai lebih tinggi sebesar 24,69 persen dibandingkan data Provinsi Banten hasil proyeksi tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peranan indikator ini sebagai pemberi kontribusi terbesar pada dimensi warisan budaya. Penggunaan produk tradisional yang menjadi ciri khas Kabupaten Tangerang adalah kerajinan bambu salah satunya topi bambu yang secara resmi diusulkan pemerintah Kabupaten Tangerang dan berhasil masuk 4 besar usulan nominasi UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) atau jaringan Kota Kreatif UNESCO Tahun 2025 (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2024a).

Perbedaan selisih yang cenderung tinggi dan bernilai lebih rendah di Kabupaten Tangerang daripada hasil perhitungan provinsi ada pada beberapa indikator antara lain persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah (-30,30), persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga (-18,22), persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat (-15,99), persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (-13,67), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir (-8,82).

Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan dimensi ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan budaya literasi yang bernilai lebih rendah, walaupun selisih nilainya tidak jauh berbeda. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan nilai dimensi tersebut adalah dengan melakukan upaya pemajuan nilai indikator-indikator tersebut. Sementara itu, nilai dimensi pendidikan dan ekspresi budaya sedikit lebih tinggi karena dipengaruhi besaran capaian indikator lain.

Indikator-indikator dengan capaian nilai lebih besar ketimbang data provinsi hasil proyeksi 2024 meliputi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir (30,74), persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional (24,69), persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian (17,67), persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir (15,65), persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku (7,93), persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama (5,94), persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah (0,72), persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir (0,53). Besaran nilai indikator ini menunjukkan bahwa pada beberapa indikator sudah terlaksana dengan

baik di Kabupaten Tangerang khususnya pada bidang pendidikan, yang harapannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya.

4.3.2 Perbandingan dengan IPK Indonesia

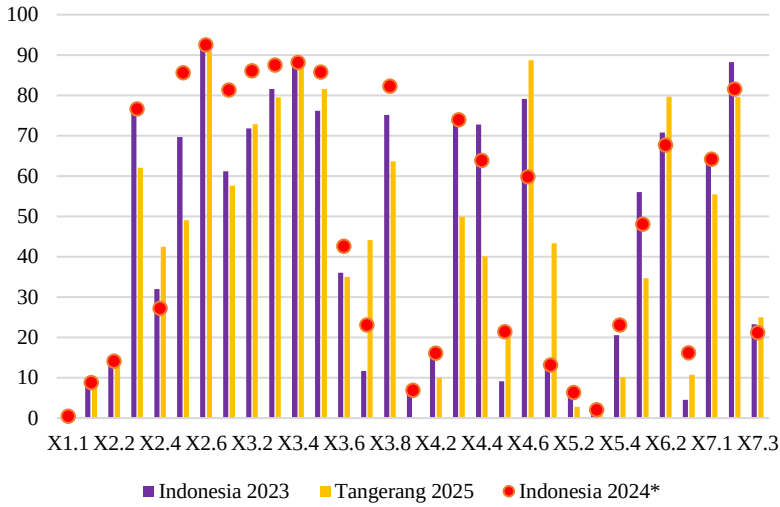
Tabel 7. Perbandingan nilai dimensi IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Indonesia Tahun 2023-2024

Dimensi	Nilai Indeks		
	Nasional 2023	Nasional 2024*	Tangerang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Ekonomi Budaya	29,50	50,00	16,67
Pendidikan	73,35	75,42	71,36
Ketahanan Sosial Budaya	70,73	67,89	61,19
Warisan Budaya	51,54	57,61	48,90
Ekspresi Budaya	34,91	39,01	36,96
Budaya Literasi	60,49	71,04	62,06
Gender	58,71	55,67	53,37
IPK Total	**57,13**	**61,85**	**52,97**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2024)
Catatan:
* adalah nilai 2024 berdasarkan perhitungan *series data* sebelumnya

Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan pola yang sama antara dimensi data Provinsi Banten dan Indonesia kecuali pada dimensi ekonomi budaya pada proyeksi nilai Indonesia tahun 2024 yang berkategori cukup, sehingga nilai proyeksi IPK total berhasil naik menjadi kategori baik pada level nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi pada dimensi ekonomi budaya di

Kabupaten Tangerang yang hanya memiliki kriteria capaian kurang dibandingkan nilai dimensi level nasional. Penelitian Sidauruk (2013) menyebutkan beberapa masalah yang terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis budaya antara lain belum maksimalnya kebijakan terkait ekonomi budaya, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, ketersediaan infrastruktur, pemodalan, kualitas pendidikan dan pelatihan, serta daya dukung riset dan pengembangan. Berdasarkan tulisan Prajanti et al. (2021) diperoleh bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif meliputi kemudahan perizinan, efisiensi dan efektifitas anggaran, optimalisasi pelatihan, inovasi pemasaran digital, dan kolaborasi peran masing-masing *stakeholder*. Hasil keterbandingan nilai pada hampir seluruh dimensi pembentuk IPK Kabupaten Tangerang masih menununjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan perhitungan IPK Nasional tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024, sehingga dibutuhkan usaha ekstra bagi semua pihak terkait terutama pemangku kebijakan dalam mendukung berbagai dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Tangerang.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2024)
Catatan:
* adalah nilai 2024 berdasarkan perhitungan *series data* sebelumnya

Gambar 4. Grafik batang perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan IPK Indonesia Tahun 2023-2024

Hasil perbandingan nilai IPK Kabupaten Tangerang dengan capaian IPK level nasional pada Gambar 4 menunjukkan bahwa secara umum nilai indikator-indikator penyusun IPK lebih tinggi daripada nilai level nasional baik pada tahun 2023, tetapi lebih rendah dari hasil proyeksi tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan nilai dimensi-dimensi penyusun IPK juga memiliki kecenderungan bernilai rendah. Namun, masih terdapat beberapa varibel yang berhasil memiliki capaian nilai lebih tinggi daripada proyeksi nilai tahun 2024 seperti persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir (30,18), persentase

rumah tangga yang menggunakan produk tradisional (28,89), persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir (21,06), persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian (15,25), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir (11,96), rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki (3,81), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (0,39), dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (0,27). Sejalan dengan hasil perbandingan level provinsi bahwa partisipasi seseorang selama rapat menjadi indikator dengan selisih nilai positif terbesar.

Indikator yang memiliki hasil perbandingan lebih rendah dari proyeksi nasional 2024, dengan selisih cukup jauh terdiri atas persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah (-36,63), persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari (-24,03), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni (-23,79), persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal (-23,72), dan persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga (-18,66). Indikator yang membutuhkan lebih banyak dorongan masyarakat persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah karena memiliki nilai selisih terbesar. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang inklusif dan khusus termasuk penyediaan sarana prasaran serta biaya pendidikan. Penelitian Arifa (2024) menyebutkan terkait upaya peningkatan pendidikan bagi penduduk penyandang disabilitas antara lain pengembangan guru dan staf sekolah terutama guru pendamping khusus melalui berbagai pelatihan, mendorong partisipasi orang tua dan komunitas, memastikan kecukupan anggaran, serta mendukung penelitian, dan inovasi pendidikan inklusif agar mampu mendorong akses dan partisipasi siswa.



PENUTUP

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimaksudkan untuk menilai kinerja dan perkembangan sektor kebudayaan, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai pengawas terkait keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kebudayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas nasional. Melalui perhitungan IPK juga dapat diperoleh evaluasi terkait pelaksanaan masa kini dan menjadi bahan perencanaan dalam penguatan/pengembangan kebijakan kebudayaan di masa mendatang. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat memberikan panduan yang berbasis pengetahuan *(evidence-based-policy)* dalam mengidentifikasi prioritas kebijakan dan program dalam rangka mendorong efektivitas pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tangerang.

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang di tahun 2025 sebesar 52,97 yang termasuk dalam kategori cukup. Dimensi yang menjadi unggulan dalam pembentukan IPK dengan capaian skor **tertinggi** berada pada **Dimensi Pendidikan**, sementara itu dimensi yang masih membutuhkan kebijakan khusus dengan skor **terendah** masih pada **Dimensi Ekonomi Budaya**. Selain itu, **Dimensi Ketahanan Sosial Budaya** dan **Literasi Budaya** juga

bernilai baik, sedangkan **Dimensi Ekspresi Budaya** berkategori sedang. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya lebih untuk memaksimalkan potensi sektor budaya, khususnya dalam menunjang peningkatan nilai tambah perekonomian bidang budaya dan pemulihan ekspresi budaya yang capaiannya masih bernilai rendah.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan baik pada level Provinsi Banten maupun nasional, diperoleh pola yang serupa. Walaupun nilai setiap dimensi dan indikator pembentuknya tahun 2025 cenderung lebih rendah dibandingkan data level provinsi dan nasional, namun capaian setiap dimensinya berada pada posisi yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah cukup baik dalam mengembangkan kebudayaan di Kabupaten Tangerang pada berbagai sektor kehidupan. Walaupun masih perlu dilakukan beberapa optimalisasi kebijakan dalam mendukung peningkatan beberapa indikator seperti persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah dengan selisih capaian yang cukup tinggi. Disisi lain beberapa indikator seperti persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir dan persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional menjadi indikator bernilai tinggi pada wilayah Kabupaten Tangerang yang nilainya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Nilai capaian IPK Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan melalui pengembangkan sejumlah program yang tepat sasaran di bidang kebudayaan agar nilainya dapat mengikuti posisi IPK baik di level provinsi dan nasional.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain:

1. Pembuatan kebijakan terkait kebudayaan di masa mendatang didasarkan dari capaian nilai setiap dimensi serta memperhatikan indikator-indikator yang menjadi keunggulan serta kelemahan dalam pembentukan dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan.
2. Perlu dilakukan upaya lebih dalam mendorong pengembangan dimensi ekonomi budaya yang menjadi dimensi dengan nilai terendah seperti meningkatkan kreativitas, memperkuat promosi dan *branding* produk, memaksimalkan kolaborasi dan kemitraan antara pelaku budaya dengan pelaku ekonomi, mengembangkan riset dan pendidikan terkait kebudayaan, memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan, menyediakan sarana prasarana penunjang kebudayaan, memberikan insentif, memfasilitasi kekayaan intelektual, dan melindungi hasil kreativitas.
3. Perlu dilakukan upaya dalam menunjang peningkatan indikator persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah yang menjadi indikator dengan selisih nilai negatif tertinggi dengan capaian nilai indikator IPK level Provinsi Banten dan Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni mengembangkan kualitas guru serta staf sekolah terutama guru pendamping khusus melalui berbagai pelatihan, mendorong

partisipasi orang tua dan komunitas, memastikan kecukupan anggaran, serta mendukung penelitian dan inovasi pendidikan inklusif agar mampu mendorong akses dan partisipasi siswa.

4. Perlu dilakukan optimalisasi pengajuan benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya takbenda agar bisa ditetapkan baik pada level kabupaten/kota ataupun level provinsi. Hal ini sebab kedua indikator ini bernilai sangat rendah yang menyebabkan rendahnya nilai dimensi warisan budaya.
5. Perlu dibentuk program kolaborasi antar organisasi pemerintah daerah yang dijembatani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merancang penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan, *Roadmap* Rencana Aksi dan program efektif dalam rangka medorong perkembangan sektor budaya di Kabupaten Tangerang. Hal ini sebab kajian terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan bersifat lintas sektoral.
6. Dapat dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan menggunakan metode yang lebih komprehensif untuk dapat menggambarkan kompleksitas capaian pembangunan budaya suatu wilayah diikuti penambahan indikator terutama pada dimensi ekonomi budaya agar terjadi keseimbangan beban capaian untuk setiap dimensi.
7. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam terkait analisis faktor-faktor penyebab penurunan maupun kenaikan nilai indikator pembentuk setiap dimensi serta analsiis korelasi antardimensi IPK Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA/*REFERENCES*

Amalyah, A., Aziz, F., Ilma, R., & Ferdiana, R. (2024). Penurunjan Budaya Literasi dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, *7*(4), 18766–18772.

Andrianto. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN, dan MAN di Kabupaten Tangerang*. [Skripsi]. [Kota Serang]: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Arifa, F. N. (2024). Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat*, *XVI*(3), 21–25.

BPS. (2024). *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2021-2023*. Hukum dan Kriminal. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS Kabupaten Karanganyar. (2023). *Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023*. Karanganyar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.

BPS Kabupaten Tangerang. (2024a). *Angka Partisipasi Murni, 2023*. Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

BPS Kabupaten Tangerang. (2024b). *Angka Partisipasi Sekolah, 2023*. Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

BPS Kabupaten Tangerang. (2025). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (Milyar Rupiah), 2022-2024*. Tangerang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

BPS Provinsi Bali. (2012). *Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2011*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

BPS Provinsi Banten. (2020). *Jumlah Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Menurut*

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2019. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

BPS Provinsi Maluku Utara. (2019). *Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Maluku Utara 2018*. Kota Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.

Bupati Kabupaten Tangerang. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kebudayaan Daerah*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pemerintah RI.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2017a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2017b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* Jakarta: Pemerintah RI.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Pemerintah RI.

Dewi, S., & Jasmina, T. (2023). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *8*(2), 120–137.

Duxbury, N., Hosagrahar, J., & Pascual, J. (2016). *Why must culture be at the heart of sustainable urban development?*

Inwantoro, T. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014*. 1–6.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Analisis Partisipasi Kebudayaan 2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Internet]. (2024). Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; [diakses 10 Maret 2025]. Tersedia dari: https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/

Kementerian PPN/Bappenas. (2023a). *Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang*. Dataset. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2023b). *Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Tangerang*. Dataset. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Khairani, A., Hakiki, N. I., & Yopan, M. (2025). Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, *8*(1), 45–51.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan*. Pemerintah RI.

Muslimin. (2018). Penumbuhan Budaya Literasi Melalui Peningkatan Minat Baca Masyarakat Desa. *Cakrawala Pendidikan*, *37*(1), 107–118.

Nuryadin, M. R. (2024). *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik di Kota Makassar*. [Skripsi]. [Kota Makassar]: Universitas Hasanuddin.

Pemerintah Kabupaten Tangerang [Internet]. (2024a). *Kerajinan Bambu Pemkab Tangerang Lolos 4 Besar UCCN UNESSCO*.

Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang; [diakses 4 April 2025]. Tersedia dari: https://tangerangkab.go.id/detail-berita/kerajinan-bambu-pemkab-tangerang-lolos-4-besar-uccn-unessco

Pemerintah Kabupaten Tangerang [Internet]. (2024b). *Perpustakaan Digital Tingkat Desa, Disperpusip Dorong Minat Baca Masyarakat*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang; [diakses 1 April 2025]. Tersedia dari: https://tangerangkab.go.id/detail-berita/perpustakaan-digital-tingkat-desa-disperpusip-dorong-minat-baca-masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang [Internet]. (2024c). *Topi Bambu Kerajinan Unggulan di Kabupaten Tangerang*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang; [diakses 1 April 2025]. Tersedia dari: https://tangerangkab.go.id/detail-berita/topi-bambu-kerajinan-unggulan-di-kabupaten-tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang [Internet]. (2025). *Dukung Produk Lokal, Sekda Imbau ASN Pakai Sepatu Batik Tangerang*. Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang; [diakses 1 April 2025]. Tersedia dari: https://tangerangkab.go.id/detail-berita/dukung-produk-lokal-sekda-imbau-asn-pakai-sepatu-batik-tangerang

Portal Informasi Indonesia [Internet]. (2024). *Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital; [diakses 5 Mei 2025] Tersedia dari: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8747/tantangan-besar-asta-cita-dan-keberlanjutan-pembangunan?lang=1

Prajanti, S. D. W., Margunani, M., Rahma, Y. A., Kristanti, N. R., & Adzim, F. (2021). Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, *15*(2), 86–101.

Prasetiyo, S. M., Gustiawan, R., Faarhat, & Albani, F. R. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. *Jurnal Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA)*, *2*(1), 65–71.

Presiden RI. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor*

115 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 - 2045. Pemerintah RI.

Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Pemerintah RI.

Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata. *Jurnal Kepariwisataan*, *01*(02), 54–69.

Selvilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (1992). *Research Methods*.

Sidauruk, R. (2013). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*, *05*(03), 141–158.

Simanjuntak, G. F., Bakar, A. A. A. P., Siagian, N. R. A., Mulyadi, M., Lewoleba, K. K., Atiyyah, R., & Marza, S. E. (2023). Pemanfaatan Warisan Budaya Menghindari Ancaman Globalisasi Mewujudkan Indonesia Emas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 905–919.

Tambunan, A. A. (2016). *Partisipasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan dalam Pencalonan Anggota Legislatif 2014 di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD."

Thresnawaty, E., Rosyadi, Lasmiyati, Dahlan, M. H., Setiawan, I., & Nirmala, W. (2017). *Penyusunan Dokumentasi Pelestarian Nilai Budaya "Potensi Budaya di Kabupaten Tangerang."*

Tjeme, B. B. (2024). Kontribusi Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Sikka. *Jurnal Transformasi Bisnis Digita*, *1*(4).

UNESCO [Internet]. (2009). *UNESCO Culture for Development Indicators (CDIS)*. Prancis: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; [diakses 11 Maret 2025].

Tersedia dari: https://www.unesco.org/creativity/en/activities/cdis

INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) KABUPATEN TANGERANG



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

BAPPEDA TANGERANG REGENCY

Alamat : Jl. H. Somawinata Blok D, No.1, Kadu Agung,
Tigaraksa - Tangerang 15720
Telp/Faks : (021) 5994156
Email : helpdesk@tangerangkab.go.id